

AMIN Lanjutkan Tol Sampai Banyuwangi

BANYUWANGI (KR) - Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengakui pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) siap melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Jawa hingga ke Banyuwangi Jawa Timur.

"Banyuwangi ini sangat penting, karena kaya sumberdaya alam," katanya usai kegiatan selawat dan rajabiah dengan ratusan kiai dan nyai kampung di Pondok Pesantren Raudhotultholabah Genteng, Selasa (6/2).

la menjelaskan, pasangan AMIN mengusung visi, misi dan program kerja, dengan tema besar Indonesia adil makmur untuk semua. Khusus di Pulau Jawa, pembangunan didesain untuk pondasi ekonomi yang berkelanjutan. "Salah satunya, Tol Trans Jawa yang pembangunannya dituntaskan sampai Banyuwangi," ujarnya.

Selain itu, dilakukan pula pembangunan jalan arteri sebagai akses tol dan penyelesaian tarif bagi kendaraan logistik.

Dilansir dari situs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang saat ini sedang dilakukan pelaksanaan konstruksi pada Tahap 1 Gending-Besuki sepanjang 49,7 kilometer.

Hadimya Jalan Tol Trans Jawa akan menghubungkan ujung barat hingga ujung timur pulau Jawa untuk meningkatkan konektivitas serta mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terdiri dua tahap pelaksanaan konstruksi pada tahap 1 ini terbagi menjadi Seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 Km) dengan progres konstruksi 15,01%, Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 Km) dengan progres konstruksi 2,61% dan Seksi 3 Paiton-Besuki (25,6 Km) dengan progres konstruksi 0,65%. **(Ant)-f**

12 Kecamatan

Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan warga yang menjadi korban banjir di Grobogan sudah dievakuasi pada Selasa petang. "Tim Gabungan telah melakukan penanganan darurat bencana di Grobogan dengan mengevakuasi penduduk setempat," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Sejumlah perjalanan kereta api juga terdampak banjir. Setidaknya ada 12 perjalanan KA yang terganggu. Rinciannya, lima KA penumpang dan sisanya KA barang. Di antara KA penumpang yang terganggu perjalanannya, terdapat KA Kedungsepur dan KA Ambarawa Ekspres. Dua perjalanan KA itu dibatalkan karena banjir. "KA Kedungsepur 546 dan KA Ambarawa Ekspres 230 yang dijadwalkan berangkat pukul 09.30 WIB kita batalkan," ungkap Manajer Humas Daop 4 Semarang Franoto Wibowo.

Sementara itu BPBD Kabupaten Demak memperkirakan jumlah rumah warga yang terdampak banjir menyusul adanya tanggul sungai



KR-M Taslim

Petugas BPBD Grobogan menyelamatkan seorang warga ke atap rumah akibat banjir.

yang jebol mencapai 4.000 rumah yang tersebar di lima desa. "Keenam desa tersebut yakni Desa Sidorejo dan Rejosari, Kecamatan Karangawen, Desa Pilangwetan dan Kebonagung, Kecamatan Kebonagung, dan Kaliyantar, Kecamatan Wonosalam," kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak M Agus Nugroho Luhur P.

Selain permukiman dan areal pertanian yang luasannya mencapai 275 hektare, banjir juga berdampak pada enam bangunan sekolah, satu masjid, dan kantor kelurahan. Semen-

tara jumlah warga yang terdampak diperkirakan mencapai ribuan. Bahkan, akibat banjir yang terjadi sejak Senin (5/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB, sejumlah warga terpaksa mengungsi. Di antaranya di Desa Sidorejo 62 warga mengungsi di masjid, sedangkan di Kantor UPTD 54 jiwa.

Dari Banjarnegara dilaporkan, bukit di sisi atas permukiman warga Dusun Timbang Rt 02/04, Desa Nagasari, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Selasa dini hari longsor, mengakibatkan tiga rumah rusak dan satu

"Capek

"Baliho, spanduk, umbul-umbul, dan lain sebagainya terpasang di setiap tempat. Ada yang dipaku pada pohon-pohon, bergantung pada pagar-agar jalan, bahkan ada yang sampai pagarnya roboh," kata Puan.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak suara untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Dukungan dari rakyat terhadap Pemilu 2024 dapat berkontribusi terhadap kemajuan ne-

gara. "Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera, hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih nyaman," ujar Puan. **(Ant)-d**

Literasi

(Outcome Based Education/OBE). Kurikulum OBE menekankan pada tiga (3) macam literasi yaitu Literasi Manusia, Literasi Data, dan Literasi Teknologi. Tampaknya kurikulum OBE perlu direvisi dengan menambahkan satu literasi lagi yaitu Literasi Politik.

Bagi banyak kalangan politik merupakan hal yang tabu bahkan tidak disukai, mungkin karena ulah para politisi yang sering tidak berkenan bagi kalangan tersebut. Sejatinya politik yang berasal dari kata *politika* (Yunani kuno) berarti 'urusan kota', sehingga istilah politik memiliki makna harafiah sebagai 'hak warga dalam hidup bernegara'. Artinya setiap warga negara memiliki hak untuk bernegara atau hak yang melekat sebagai warga suatu negara.

Tampaknya 'hak yang melekat sebagai warga negara' belum sepenuhnya dirasakan setiap kalangan di Indonesia. Misalnya hak mendapatkan pendidikan, tetapi nyatanya tidak semua kalangan dapat menikmati pendidikan sampai perguruan tinggi. Contoh lainnya lagi yaitu hak memperoleh pekerjaan, tetapi lowongan

kerja justru semakin terbatas.

Pendidikan politik sangat diperlukan agar warga negara sadar akan hak-haknya, khususnya hak yang paling اساس. Pendidikan politik seharusnya dapat membuka wawasan semua kalangan untuk menerima atau menolak iming-iming partai politik dan/atau politisi yang datang lima tahun sekali. Masyarakat yang telah memiliki pendidikan politik tidak mudah larut dalam mendukung partai atau politisi tertentu. Pendidikan politik yang baik yakni pendidikan yang mampu mengubah perilaku politik warga negara. Perilaku politik partai politik, politisi, dan pihak pendukungnya sangat sering membuat banyak kalangan 'menjauh' dari urusan politik. Contoh paling mudah : A pada masa kampanye menjadi lawan politik B. Ketika B terpilih menjadi presiden, kok si A bersedia menjadi salah satu menterinya? Padahal pendukung setia A masih 'membenci' si B.

Masih banyak contoh serupa dapat dituliskan di sini. Tetapi intinya perilaku politik seperti itu tentu bukan contoh perilaku politik yang baik bagi masyarakat. Benar

bahwa di dunia politik berlaku adagium : *tidak ada lawan atau kawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan.*

Perilaku pihak pendukung yang emosi, marah, dan mengamuk ketika jagonya kalah. Dalam kontestasi politik perlu diubah menjadi menerima kekalahan dengan *legawa*, tetapi siaga mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh si pemenang. Kekalahan bukan berarti kehilangan segalanya. Kekalahan justru dapat memberikan keuntungan tertentu yaitu menjadi pihak penyeimbang, yang sebetulnya setara kedudukannya dengan pemenang.

Gelombang pernyataan/petisi/keprihatinan kalangan pendidik menjelang Pemilu 2024 bergema dan sambung menyambung ke seluruh Indonesia. Sangat diharapkan gaungannya akan mewujudkan menjadi pendidikan politik bagi segenap masyarakat. Literasi politik merupakan cita-cita para pendiri bangsa menuju 2045: "Masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera".

(Penulis adalah pendidik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)-d



Sutarni, S.E., M.M.
Dosen Prodi Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta

KETIKA membeli sebuah rumah yang pertama harus difikirkan adalah bagaimana pembayaran pajaknya. Terkadang ada beberapa pajak yang harus dibayar diluar harga rumah itu

Pajak yang Harus Dibayar Saat Jual Beli Rumah

sendiri, dapat dibayar juga pajak yang dikeluarkan cukup besar yang dapat memberatkan calon pembeli rumah.

Dilansir dari OJK, ada beberapa bea atau pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah, diantaranya yaitu :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB dikenakan pada saat seseorang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, misalnya pada saat membeli rumah atau bangunan, besaran yang harus dibayarkan adalah 5% dari nilai transaksi dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena

pajak (NPOPTKP). NPOPTKP ini besarnya berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat. Pajak ini diwajibkan sebagian dari proses perolehan hak atas properti, untuk peralihan hak berupa jual beli, pajak dikenakan kepada kedua belah pihak baik kepada penjual ataupun pembeli. Kepada penjual dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) dan pembeli dikenakan BPHTB yang besarnya dihitung berdasarkan harga perolehan hak atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Dalam bahasa sehari-hari, NPOP bisa juga diartikan sebagai nilai transaksi atau nilai kesepakatan harga antara

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas properti adalah pajak yang dikenakan pada saat Anda menjual properti milik Anda dan pajak ini bersifat konsumsi dimana pembeli properti yang membayar pajaknya, serta dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah transaksi penjualan. PPN adalah pajak yang dibebankan kepada pembeli untuk primary property atau properti baru. Untuk besarnya yaitu 11% dari harga rumah yang dibeli. Ketentuan ini tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang

penjual dan pembeli.

3. Pajak Penjualan Barang Mewah

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Walau demikian, saat ini pemerintah memberikan bantuan berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) 100% untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar, sementara untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar calon pembeli hanya perlu membayar 50% PPN saja. Kebijakan ini berlaku sampai Juni 2024, selanjutnya akan diterapkan aturan PPN DTP 50%, artinya calon pembeli hanya perlu membayar 50% PPN saja.

(PPnBM)

PPnBM yaitu pajak yang dikenakan kepada pembeli yang rumahnya dikategorikan sebagai barang mewah. Untuk rumah yang tergolong barang mewah adalah jika harga jualnya melebihi Rp20 Miliar dan Rp10 Miliar masing-masing untuk rumah atau town house dari jenis non-strata title serta apartemen kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya. Besaran dari PPnBM ini adalah 20% (dua puluh persen) dari harga jual. Banyak generasi Baby Boomers yang harga rumahnya melonjak dan kini harus menghadapi



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-30	65-95
Sleman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-29	65-95
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-29	65-95
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-30	65-95
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-30	65-95
Cerah	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]		
Berawan	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]		
Udara Kabur	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]		
Hujan Lokal	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]		
Hujan Lebat	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]		

Advertisement for Universitas Amikom Yogyakarta Creative Economy Park, featuring a portrait of Sutarni, S.E., M.M. and text about taxes on house buying and selling.